



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019**





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **85** TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Rencana Kerja Badan Daerah;
- f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
- g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
- h. Rencana Kerja Kecamatan.

(2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. Terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 27 juli 2018

BUPATI BANTUL, 



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 27 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 85

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul harus mengacu pada kebijakan Pusat, kebijakan DIY serta kebijakan Kabupaten Bantul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai OPD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, mempunyai indikator kinerja, yang salah satunya adalah ***pertumbuhan investasi***.

Kegiatan investasi (penanaman modal) merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim yang kondusif sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Hal seperti ini akan berdampak pada lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing.

Selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor juga terjadi karena:

- a. Tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung;

- b. Kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal; serta
- c. Belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah.

Dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- b. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan online tracking system. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku.

Selaras dengan upaya yang ditempuh oleh BKPM RI, Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) DIY juga berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di DIY.

Visi BKPM DIY adalah **" Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta "**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi BKPM DIY sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal;
- b. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah;
- c. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Secara regional, investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan porsi yang mencapai sekitar 90% baik untuk PMDN maupun PMA. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pengelompokan investasi (*aglomerasi*), antara lain daya dukung infrastruktur, SDM, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, BKPM DIY berharap dapat terjadi pertumbuhan realisasi investasi yang cukup signifikan di DIY, terutama di wilayah kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul yang memang masih tertinggal dari wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Mengacu pada kebijakan BKPM RI dan BKPM DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terpacu untuk berupaya membangun iklim penanaman modal yang lebih kondusif di Bantul. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) tahunan, menjadi tonggak awal upaya peningkatan nilai investasi daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional/DIY/Kabupaten, khususnya di bidang Penanaman Modal.

Tahun Anggaran 2019 adalah tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP;
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- f. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- j. Peraturan Kepala Badan koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;
- l. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- m. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- n. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;

- o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Republik Indonesia;
- p. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
- q. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
- s. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul;
- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar 94.87%. Dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu sebesar 94.46%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77.06%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Persentase layanan perizinan dan nonperizinan menyerap anggaran paling besar yaitu 94.46% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 77.06% dari target.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 114.1% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2018) dengan pelaksanaan program/kegiatan serta upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik, maka peningkatan realisasi akan bisa dicapai.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPT dan Pencapaian Renstra DPMPT s/d Tahun 2018 Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2 12	Bidang Urusan Penanaman Modal								
2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	95,62	95,62	100	100	100
2 12 01 36	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	108 ob	108 ob	100	108	216	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
		Jumlah paket jasa kebersihan	12 ob	12 ob	12 ob	100	12 ob	24 ob	100
		Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
		Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
		Jumlah paket surat kabar dan majalah	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
		Jumlah pengadaan ATK	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
		Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	10 buah	10 buah	10 buah	100	10 buah	20 buah	100
		Jumlah paket komponen alat kebersihan	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100
		Jumlah Perangkat dan Materai	489 lbr	489 lbr	489 lbr	100	1204 lbr	1693 lbr	100
		Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
		Jumlah penggandaan	12 bl	12 bl	12 bl	100	66252 lbr	222258 lbr	100
		Jumlah paket servis perlengkapan kantor	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
		Jumlah paket premi	-	-	-	-	12 ob	12 ob	100

		asuransi							
2 12 01 37	Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	12 paket	12 paket	12 paket	100	950 oh	950 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman rapat (snack rapat)	12 paket	12 paket	12 paket	100	500 oh	500 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Makan Tamu)	12 paket	12 paket	12 paket	100	300 oh	300 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Snack Tamu)	12 paket	12 paket	12 paket	100	200 oh	200 oh	100
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
		Jumlah pembelian Aqua gelas, Aqua gallon	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
		Jumlah perjalanan ke luar daerah	19 oh	19 oh	19 oh	100	880 oh	880 oh	100
		Jumlah perjalanan ke dalam daerah	108 oh	108 oh	108 oh	100	880 oh	880 oh	100
2 12 01 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	24 ob	24 ob	100	24 ob	48 ob	100
		Jumlah paket premi asuransi petugas keamanan	-	-	-	-	24 ob	48 ob	100
		Jumlah paket ATK	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100

2	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	92,68	92,68	100	100	92,68
2	12	02	51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 unit	7 unit	6 unit	100	14 unit	20 unit	100
2	12	02	52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
2	12	02	53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opeasional	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	20 unit	100
2	12	02	54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100
2	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100			100
2	12	05	18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan	Jumlah pelaksanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	100

				Peningkatan Kapasitas Aparatur	kegiatan							
2	12	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100			100
2	12	06	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah laporan kinerja OPD,realisasi fisik triwulanan	48 dok	48 dok	48 dok	100	48 dok	96 dok	100
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi	8	8	8	100	8	16	100
2	12	15	18	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	2 kali	2 kali	100	1 kali	3 kali	100
2	12	15	19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	4 kali	4 kali	4 kali	100	3 kali	7 kali	100
2	12	15	20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengembangan potensi penanaman modal	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	6 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
2 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi investasi	8	8	8	100	8	16	100
2 12 16 16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	60	60	70	100	75	145	100
2 12 16 18	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian penanaman modal	2 dok	2 dok	2 dok	100	3 dok	5 dok	100
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 07	Bidang Fungsi Lainnya								
4 07 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
4 07 23 01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
4 07 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai				100			100

4	07	28	11	Pendampingan Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu	standar mutu Jumlah paket pendampingan pelayanan sesuai standar mutu	2 keg	2 keg	2 keg	100	5 keg	7 keg	100
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)	
4	07	31		Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, Cakupan penetapan pelayanan perizinan, Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan, Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat		90	93.92	93.92	100	90	93.92
4	07	31	02	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Jumlah peserta sosialisasi	450 org	450 org	450 org	100	600 org	1050 org	100
4	07	31	04	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah paket komponen operasional pelayanan Perizinan	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100

4	07	31	05	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Jumlah perizinan terbit dalam satu tahun	7000	7000	6163	99.97	6000	12163	100
4	07	31	06	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Persentase Penanganan pengaduan	90	90	90	90	90	90	90
4	07	31	07	Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Jumlah kajian tentang Peraturan Pemerintah tentang perizinan	1 perda	1 perda	1 perda	100	2 perda	2 perda	100
4	07	31	10	Pengelolaan Perizinan On Line	Jumlah paket pengelolaan online	12 bl	12 bl	12 bl	100	1 paket	1 paket	100
4	07	31	13	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	4 kali	100
4	07	31	15	Peningkatan Kualitas SDM Customer Services Pelayanan Perizinan	Jumlah honor SDM Customer Servis perijinan	77 ob	77 ob	77 ob	100	-	77 ob	100
4	07	31	16	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	100
4	07	31	17	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Jumlah peserta loka karya	75 org	75 org	75 org	100	70 org	145 org	100
4	07	31	24	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	400 izin	400 izin	376 izin	100	200 izin	576 izin	100
4	07	31	25	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah peserta loka karya	-	-	-	-	70 org	70 org	100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2017 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 77, realisasi sebesar 70.98, tercapai 92.1% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 81.60 atau tercapai sebesar 108,8.%, maka capaian tahun 2017 menurun sebesar 27.2%.

Sedangkan realisasi capaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh data bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 83,08. Skor ini mengalami peningkatan dari periode lalu yang mencapai nilai 81,03. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “sangat baik” karena berada pada kisaran nilai 81,26 - 100.

Realisasi capaian kinerja selanjutnya terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi bahwa pada tahun 2017 pertumbuhan nilai investasi ditargetkan sebesar Rp.95.924.128.041,86 dan nilai capaian realisasi di tahun 2017 mencapai Rp.183.334.086.687,60. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2016 yang mencapai Rp.142.143.455.561,11 terjadi kenaikan sebesar Rp.41.190.631.126,49. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 8.6%, realisasi sebesar 12.72%.

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersusun dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	Persentase Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tepat Waktu	77	79	81	83	85	70.98	79	81	83	85	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 77, realisasi sebesar 70.98, tercapai 92.1%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 81.60 atau tercapai sebesar 108,8%, maka capaian tahun 2017 menurun sebesar 27.2%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85 %. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 83.5%% dari target akhir Renstra tahun 2021
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	79	79,5	80	80,5	83,08	79	79,5	80	80,5	Mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 83,08. Skor ini mengalami peningkatan dari periode lalu yang mencapai nilai 81,03. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “sangat baik” karena berada pada kisaran nilai 81,26 - 100.
3	Pertumbuhan Investasi	8,6	8,8	8,9	9	9.5 9,5	12,72	8,8	8,9	9	9.5 9,5	Realisasi melebihi target. Realisasi sampai dengan tahun 2017 mencapai 183.334.086.687,60. Terjadi kenaikan sebesar 41.190.631.126,49 jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2016 yang mencapai 142.143.455.561,11 Catatan: Realisasi investasi pada tahun 2017 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs https://lkpmonline.bkpm.go.id

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan perubahan lingkungan organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan permasalahan organisasi semakin kompleks. Demikian halnya yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu;

5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;

2) Belum memadainya sarana dan prasarana;

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

3) Belum tersosialisasikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD baru di lingkungan Pemkab Bantul;

Tersosialisasinya keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan lebih memudahkan masyarakat umum dan investor dalam kaitannya dengan investasi dan pengurusan perizinan yang mereka perlukan.

c. Faktor Peluang Organisasi

1) Adanya penerapan nyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah memberikan peluang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.

2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

- 3) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Bantul; Tingginya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha di Bantul akan mendorong aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada public dalam hal berinvestasi serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bantul.
- 4) Tersedianya kesempatan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM RI;
- 5) Upaya deregulasi pelayanan penanaman modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota menegaskan, bahwa PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. Ketentuan ini tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk melakukan deregulasi penanaman modal. Regulasi daerah yang selama ini berlaku sebagai acuan pelayanan penanaman modal harus segera disesuaikan. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul perlu ditindaklanjuti dengan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- d. Faktor Tantangan Organisasi
 - 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
 - 2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi

terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang harus dilakukan;

- 3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

Dengan memperhatikan faktor kelemahan organisasi dan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan organisasi dan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Mengirimkan aparat untuk mengikuti Diklat Teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM;
2. Mengimplementasikan Pelayanan Perizinan On Line;
3. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;
4. Menginisiasi regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP;
5. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah melalui berbagai media promosi, seperti:
liflet, brosur, infografi, siaran radio, surat kabar dan juga temu langsung dengan masyarakat pelaku usaha, dll;
6. Mengoptimalkan sosialisasi pengelolaan perizinan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat perizinan dan mekanisme pengurusannya;
7. Mengoptimalkan implementasi Standar Manajemen Mutu dalam penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima di bidang penanaman modal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan RKPD Kabupaten Bantul yang sifatnya sebagai pendukung

dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Bantul.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, disajikan tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Bantul

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.284.452.660	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	943.330.200	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			256.298.660	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			335.667.700	
			Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	36.078.240			Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	36.078.240	
			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 bulan	17.409.480			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 bulan	17.409.480	
			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	11.000.000			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	11.000.000	
			Jumlah paket surat kabar	12 bulan	6.996.000			Jumlah paket surat kabar	12 bulan	6.996.000	
			Jumlah pengadaan ATK	12 bulan	38.824.500			Jumlah pengadaan ATK	12 bulan	38.824.500	
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	12 unit	90.450.000			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	12 unit	90.450.000	
			Jumlah paket komponen alat kebersihan	12 paket	18.051.000			Jumlah paket komponen alat kebersihan	12 paket	18.051.000	
			Jumlah perangko dan materai	1444 lembar	8.664.000			Jumlah perangko dan materai	1444 lembar	8.664.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	14.250.000			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	14.250.000	
			Jumlah penggandaan	72.877 lembar	14.575.440			Jumlah penggandaan	72.877 lembar	14.575.440	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			705.974.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			705.974.000	
			Jumlah perjalanan ke luar daerah	880 oh	456.174.000			Jumlah perjalanan ke luar daerah	880 oh	456.174.000	
			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	880 oh	212.150.000			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	880 oh	212.150.000	
			Jumlah pembelian aqua	388 galon	6.600.000			Jumlah pembelian aqua	388 galon	6.600.000	
			Jumlah paket makan minum rapat	1.060,00	19.150.000			Jumlah paket makan minum rapat	1.060,00	19.150.000	
			Jumlah paket makan minum tamu	600	11.900.000			Jumlah paket makan minum tamu	600	11.900.000	
	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			322.180.000	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			322.180.000	
			Jumlah honor SDM CS Perizinan	120 ob	217.800.000			Jumlah honor SDM CS Perizinan	120 ob	217.800.000	
			Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	40.800.000			Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	40.800.000	
			Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan	24 ob	3.120.000			Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan	24 ob	3.120.000	

			Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 ok	900.000			Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 ok	900.000	
			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 ob	20.400.000			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 ob	20.400.000	
			Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	120 ob	15.600.000			Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	120 ob	15.600.000	
			Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	12 ob	1.560.000			Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	12 ob	1.560.000	
			Jumlah pakaian kerja pelayanan	55 unit	22.000.000			Jumlah pakaian kerja pelayanan	55 unit	22.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	6.214.200.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	6.214.200.000	
	Pembangunan gedung kantor		Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	4.700.000.000			Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	4.700.000.000	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional (roda 4 sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit)	6 unit	950.000.000			Jumlah kendaraan dinas/operasional (roda 4 sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit)	6 unit	950.000.000	
	Peningkatan Daya Listrik		Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	1 paket	7.000.000			Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	1 paket	7.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah rehab gedung kantor	4 unit	80.000.000			Jumlah rehab gedung kantor	4 unit	80.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	75.000.000			Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	75.000.000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pembelian komponen material pemeliharaan gedung	12 paket	30.000.000			Jumlah pembelian komponen material pemeliharaan gedung	12 paket	30.000.000	
			Jumlah jasa tukang	140 orang hari	11.200.000			Jumlah jasa tukang	140 orang hari	11.200.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pembelian BBM dan pelumas	20.550,00 liter	268.000.000			Jumlah pembelian BBM dan pelumas	20.550,00 liter	268.000.000	
			Jumlah servis kendaraan dinas	17 unit	26.000.000			Jumlah servis kendaraan dinas	17 unit	26.000.000	
			Jumlah penggantian suku cadang	17 unit	25.000.000			Jumlah penggantian suku cadang	17 unit	25.000.000	
			Jumlah pengecatan mobil	2 unit	22.000.000			Jumlah pengecatan mobil	2 unit	22.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		dinas Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	20.000.000			dinas Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	20.000.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	86.200.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	86.200.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	65 orang	110.000.000	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	65 orang	110.000.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bantul	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	149.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bantul	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	149.000.000	
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kab. Bantul	1. Terlaksananya kegiatan pendampingan 2. Tersedianya dokumen ISO 3. Terlaksananya audit internal 4. Terlaksananya rapat tinjauan manajemen 5. Terlaksananya uji eksternal ISO	5 kegiatan	131.000.000	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kab. Bantul	1. Terlaksananya kegiatan pendampingan 2. Tersedianya dokumen ISO 3. Terlaksananya audit internal 4. Terlaksananya rapat tinjauan manajemen 5. Terlaksananya uji eksternal ISO	5 kegiatan	131.000.000	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 kali	5.500.000	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 kali	5.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan laporan	12 bulan	12.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan laporan	12 bulan	12.500.000	
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Bantul	Jumlah investor	8	643.857.920	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Bantul	Jumlah investor	8	643.857.920	
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal		Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	40.532.800	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	40.532.800	
	Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kali	300.750.120	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kali	300.750.120	
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal		Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	3 paket	302.575.000	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	3 paket	302.575.000	
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kab. Bantul	Persentase realisasi investasi	8	162.732.800	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kab. Bantul	Persentase realisasi investasi	8	162.732.800	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	120	64.732.800	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	120	64.732.800	
						Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kajian penanaman modal	3 dokumen	98.000.000	

7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	1	372.875.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	1	372.875.000	
	Penyusunan Sisteim Informasi terhadap Layanan Publik		Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1	372.875.000	Penyusunan Sisteim Informasi terhadap Layanan Publik	Kab. Bantul	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1	372.875.000	
8	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, Cakupan penetapan pelayanan perizinan, Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan, Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat		930.000.000	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, Cakupan penetapan pelayanan perizinan, Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan, Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat		930.000.000	
	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10 kali	270.000.000	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	10 kali	270.000.000	10	
	Operasional Pelayanan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 jenis	70.000.000	Operasional Pelayanan Perizinan	Kab. Bantul	7 jenis	70.000.000	7	
	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6.000 izin	115.000.000	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Kab. Bantul	6.000 izin	115.000.000	6.000,00	
	Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah persentase penanganan pengaduan yang tertangani	100 persen	15.000.000	Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	100 persen	15.000.000	100	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengkajian Perda tentang Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal	2 perda	85.000.000	Pengkajian Perda tentang Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal	2 perda	85.000.000	
	Pengelolaan Perizinan On Line	Kab. Bantul	Jumlah paket pengelolaan perizinan on line	1 paket	200.000.000	Pengelolaan Perizinan On Line	Kab. Bantul	Jumlah paket pengelolaan perizinan on line	1 paket	200.000.000	
	Survei Kepuasan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	2 kali	8.000.000	Survei Kepuasan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	2 kali	8.000.000	
	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	32.000.000	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	32.000.000	
	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 kali	30.000.000	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 kali	30.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	5.400 izin	50.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	5.400 izin	50.000.000	
	Lokakarya Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan lokakarya	1 kali	55.000.000	Lokakarya Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan lokakarya	1 kali	55.000.000	
					9.867.118.380					9.867.118.380	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan di Tahun 2019, telah dilaksanakan pada tanggal 12 - 21 Februari 2018. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul.

Namun demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah kecamatan se- Kabupaten Bantul, yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan dengan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah merumuskan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, yaitu: "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas". Dengan perumusan tema tersebut, Pemerintah telah menetapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas. Prioritas Nasional yang keempat adalah Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang salah satu Program Prioritasnya: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Upaya yang dilakukan BKPM RI dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

- a. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- b. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya telah menerapkan SPIPISE.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, Visi Kabupaten Bantul dijabarkan ke dalam 5 Misi Kabupaten. Misi Kabupaten Bantul yang pertama adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi dan Misi Kabupaten Bantul yang ketiga adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan. Kedua Misi Kabupaten inilah yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Guna menopang Misi pertama Kabupaten Bantul, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menyelenggarakan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Guna mengetahui sejauh mana kinerja instansi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selalu melakukan survey kepuasan masyarakat. Salah satu survey kepuasan masyarakat yang secara rutin dilaksanakan adalah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP, merupakan dukungan dalam upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Bantul. Hal ini tentu saja akan menopang Misi ketiga Kabupaten Bantul, yakni Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan.

Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang merupakan rencana tahunan, dirumuskan untuk melaksanakan Misi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan

fungsi instansi. Secara lebih detil, keterkaitan antara Program-Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Misi Kabupaten dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Program/Kegiatan dengan Kebijakan Kabupaten

Misi Kabupaten	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja DPMPT
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	1.Meningkatkan kualitas SDM birokrasi ; 2.Mengembangkan layanan birokrasi yang prima.	1.Persentase Layanan Perizinan dan Nonperizinan tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas	Peningkatan daya saing produk daerah	Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi	Pertumbuhan Investasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur, ada tambahan kegiatan, yaitu Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung/Kantor. Kegiatan ini perlu diusulkan untuk merenovasi gedung kantor sesuai tuntutan implementasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Selain itu, di Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan, ada tambahan 2 indikator kegiatan, yaitu pengadaan mobil Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit dan mobil operasional. Pengadaan mobil Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit diusulkan untuk melanjutkan kegiatan yang telah dirintis sejak Tahun 2016. Uji coba Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat merasakan adanya kemudahan pelayanan perizinan di Bantul.

Pengadaan mobil operasional juga diusulkan, mengingat sampai saat ini, kuantitas dan kualitas mobil operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masih kurang. Ada 3 bidang yang memerlukan sarana mobilitas ke lapangan, yaitu:

- a. Bidang Pendataan dan Penetapan, untuk melaksanakan survei lokasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- b. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian, untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian izin terbit;
- c. Bidang Penanaman Modal, untuk melaksanakan kegiatan pemantauan perusahaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pada Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan juga ada penambahan kegiatan, yaitu Kegiatan Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian. Kegiatan ini diusulkan untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap izin terbit. Dengan

diselenggarakannya kegiatan lokakarya, diharapkan ada kesepakatan tentang perlunya konsistensi kegiatan usaha dengan izin-nonperizinan yang dimiliki oleh pemohon perizinan dan nonperizinan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2019 terdiri dari 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.613.907.073,- (Empat miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah)

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2019 beserta pagu anggarannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.961.409.498				4.908.145.426
0212	Penanaman Modal				3.961.409.498				4.908.145.426
0212.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Capaian nilai AKIP		0 Angka	1.679.776.153			0 Angka	1.584.510.912
0212.021201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Keluaran : Jumlah honor administrasi keuangan Keluaran : Jumlah paket jasa komunikasi, internet Keluaran : Jumlah macam barang persediaan (ATK, bahan Cetak, alat listrik, materei, alat kebersihan, bendera) Keluaran : Jumlah paket surat kabar Keluaran : Jumlah pajak STNK kendaraan dinas Keluaran : Jumlah penggandaan/fotokopi Hasil : Pelayanan Perkantoran lancar	Kabupaten Bantul	12 orang bulan 12 bulan 6 macam 12 bulan 17 unit 12 bulan 12 bulan	592.351.153	APBD Kabupaten/Kota	perbaikan rincian ATK untuk lebih detail per jenis barang	12 orang bulan 12 bulan 12 macam 12 bulan 17 unit 12 bulan 12 bulan	272.887.126
0212.021201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah Keluaran : Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah Keluaran : Jumlah paket makan/minum rapat Keluaran : Jumlah paket makan/minum tamu Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan kantor		12 bulan 12 bulan 1410 orang 1271 orang 12 bulan	656.260.000	APBD Kabupaten/Kota	volume untuk perjalanan dinas disesuaikan Perjalanan Dinas untuk Bidang PM defisiensi menjadi 200 jt	12 bulan 12 bulan 1075 orang 650 orang 12 bulan	876.763.786

0212.021201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Keluaran : Jumlah honor SDM CS Perizinan Keluaran : Jumlah paket jasa keamanan kantor Keluaran : Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan Keluaran : Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa Keluaran : Jumlah pembayaran jasa kebersihan Keluaran : Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan Keluaran : Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan Keluaran : Jumlah pakaian kerja pelayanan Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pelayanan kantor	Kabupaten Bantul	150 orang bulan 24 orang bulan 24 orang bulan 3 orang kegiatan 12 orang bulan 150 orang bulan 12 orang bulan 55 unit 12 bulan	431.165.000	APBD Kabupaten/Kota		150 orang bulan 24 orang bulan 24 orang bulan 3 orang kegiatan 12 orang bulan 150 orang bulan 12 orang bulan 55 unit 12 bulan	434.860.000
0212.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Cakupan sarana dan prasarana aparatur		0 Persentase	1.432.858.345			0 Persentase	2.075.634.830
0212.021201.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Kabupaten Bantul		0	APBD Kabupaten/Kota	1. panitia pengadaan ikut di ULP 2. anggaran untuk dokumen perencanaan untuk DED mohon disesuaikan 3. Pekerjaan rehap gedung harus ada komponen untuk pekerjaan konstruksi maupun perencanaan		1.300.000.000
0212.021201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Jumlah unit pengadaan alat kantor Hasil : Cakupan peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bantul	198 unit 100 Persen	1.052.180.345	APBD Kabupaten/Kota		5 unit 100 Persen	320.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212.021201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah pembelian komponen material pemeliharaan gedung (Atap,Backwall,Pintu,Gudang,Toilet) Hasil : Terpeliharanya sarana prasarana kantor	Kabupaten Bantul	12 bulan 1 kegiatan	48.198.000	APBD Kabupaten/Kota		12 bulan 1 kegiatan	44.400.000
0212.021201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jumlah pembelian BBM Keluaran : Jumlah service kendaraan dinas Keluaran : Jumlah penggantian suku cadang Keluaran : Jumlah pengecatan mobil dinas Hasil : Terpeliharanya kendaraan Operasional	Kabupaten Bantul	15500 liter 11 unit 11 unit 5 unit 10 unit	312.500.000	APBD Kabupaten/Kota		21001 liter 17 unit 17 unit 2 unit 10 unit	389.234.830
0212.021201.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		12 bulan 12 bulan	19.980.000	APBD Kabupaten/Kota		12 bulan 12 bulan	22.000.000
0212.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0 Persentase	107.525.000			0 Persentase	118.227.500
0212.021201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Keluaran : Jumlah peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur Hasil : Peningkatan kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	60 orang 100 Persen	107.525.000	APBD Kabupaten/Kota	indikator kinerja kegiatan tidak boleh menggunakan indikator: paket, kegiatan, pekerjaan	70 orang 100 Persen	118.227.500
0212.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Capaian nilai evaluasi kinerja 2 : Sertifikat ISO 9001:2015		0 Angka 0 dokumen	113.500.000			0 Angka 0 dokumen	152.689.900

0212.021201.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendampingan Keluaran : Tersedianya dokumen ISO Keluaran : Terlaksananya audit internal Keluaran : Terlaksananya rapat tinjauan manajemen Keluaran : Terlaksananya uji eksternal ISO Hasil : Sertifikasi Surveillance ISO 9001:2005	Kabupaten Bantul	10 kali 7 dokumen 2 kali 2 kali 1 kali 1 sertifikat	103.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 kali 7 dokumen 2 kali 2 kali 1 kali 1 sertifikat	131.000.000
0212.021201.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Keluaran : Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan Hasil : Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan OPD dapat berjalan efektif	Kabupaten Bantul	12 kali 4 kali	6.000.000	APBD Kabupaten/Kota		12 kali 4 kali	6.689.900
0212.021201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan laporan Hasil : Tertibnya Laporan Keuangan, Barang, dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul	12 bulan 12 bulan	4.500.000	APBD Kabupaten/Kota		12 bulan 12 bulan	15.000.000
0212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 : Jumlah investor yang berinvestasi		0 investor	480.800.000			0 investor	779.068.083
0212.021201.15.018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Keluaran : Terlaksananya Temu Bisnis dan Kajian Kemitraan Hasil : Peningkatan Realisasi Investasi	Kabupaten Bantul	2 2 kali 1 kajian 9 persen	69.400.000	APBD Kabupaten/Kota		2 2 kali 1 kajian 9.25 persen	119.068.083
0212.021201.15.019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal Hasil : Terlaksananya Rapat koordinasi	Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa	3 4 kali 1 belanja cetak 2 kali	211.100.000	APBD Kabupaten/Kota		3 4 kali 1 belanja cetak 2 kali	330.000.000
0212.021201.15.020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Keluaran : Tersediannya Media Pengembangan Potensi Penanaman Modal Hasil : Peningkatan Realisasi Investasi	Kabupaten Bantul	1 4 paket 9 persen	200.300.000	APBD Kabupaten/Kota	Belanja Upgrade Software diperbaiki	1 4 paket 9.25 persen	330.000.000
0212.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan	1 : Persentase Realisasi Investasi		0 Persentase	146.950.000			0 Persentase	198.014.201

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
0212.021201.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Perusahaan PMDN/PMA Hasil : Peningkatan Realisasi Investasi	Kabupaten Bantul	1 60 kali	50.650.000	APBD Kabupaten/Kota	Upgrade Software perlu penjelasan	1 60 kali	90.014.201
0212.021201.16.018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal dan Kajian Penanaman Modal Hasil : Peningkatan Realisasi Investasi	Kabupaten Bantul	1 1 Kajian dan 2 Kali Koordinasi	96.300.000	APBD Kabupaten/Kota	Belanja jasa peserta dipindai ke rekening semestinya	1 1 Kajian dan 2 Kali Koordinasi	108.000.000
0407.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 : Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan		9 persen	0			9.25 persen	
0407.31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	1 : cakupan penelapan pelayanan perizinan		100 Persen	0			100 Persen	0
04	Penunjang Urusan Pemerintahan			100 Persen	0			100 Persen	0
0407	Fungsi Lainnya				652.497.575				1.607.012.399
0407.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 : Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan			652.497.575				1.607.012.399
0407.021201.23.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Keluaran : Jumlah paketan pembuatan sistem informasi Hasil : Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan		0 Persen	105.400.000			0 Persen	496.296.625
			1 paket	105.400.000		APBD Kabupaten/Kota	semua honor terkait pengadaan barang dan jasa termasuk tim penerima barang masuk di rekening honorarium tim pengadaan barang dan jasa pemeliharaan software untuk dirinci	1 paket	496.296.625
0407.31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	1 : cakupan penelapan pelayanan perizinan		0 Persen	547.097.575			0 Persen	1.110.715.774
0407.021201.31.002	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan Hasil : Informasi pelayanan perizinan sampai pada masyarakat	Kabupaten Bantul	10 kali	330.575.000	APBD Kabupaten/Kota		10 kali	290.000.000
			10 kali					10 kali	
0407.021201.31.004	Operasional pelayanan perijinan	Keluaran : Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan Hasil : Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Kabupaten Bantul	7 jenis	5.000.000	APBD Kabupaten/Kota		7 jenis	80.000.000
			7 jenis					7 jenis	

0407.021201.31.005	Pendataan dan penetapan perijinan	Keluaran : Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun Hasil : Penetapan dan Pendataan izin selama 1 tahun	Kabupaten Bantul	6000 izin 6000 izin	13.325.000	APBD Kabupaten/Kota		6000 izin 6000 izin	125.000.000
0407.021201.31.006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Keluaran : Jumlah presentase penanganan pengaduan yang tertangani Hasil : terlaksananya penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat	Kabupaten Bantul	100 persen 100 persen	8.250.000	APBD Kabupaten/Kota		100 persen 100 persen	17.000.000
0407.021201.31.007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Keluaran : Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal Hasil : Peraturan daerah untuk acuan pelayanan perizinan	Kabupaten Bantul	2 perda 2 perda	42.950.000	APBD Kabupaten/Kota		2 perda 2 perda	153.715.774
0407.021201.31.010	Pengelolaan perijinan online	Keluaran : Jumlah paket pengelolaan perizinan online Hasil : Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Kabupaten Bantul	1 kali 1 kali	14.000.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	240.000.000
0407.021201.31.013	Survei kepuasan masyarakat	Keluaran : Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Hasil : dokumen survey kepuasan masyarakat	Kabupaten Bantul	2 kali 2 dokumen	4.200.000	APBD Kabupaten/Kota		2 kali 2 dokumen	10.000.000
0407.021201.31.016	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan bantul ekspo Hasil : Informasi pelayanan perizinan sampai pada masyarakat	Kabupaten Bantul	1 kali 1 kali	32.780.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	38.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.021201.31.017	Lokakarya penanganan pengaduan	Keluaran : Jumlah lokakarya penanganan pengaduan Hasil : Terlaksananya lokakarya penanganan pengaduan	Kabupaten Bantul	1 kali 1 kali	29.948.867	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	32.000.000
0407.021201.31.024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Keluaran : Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit Hasil : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap izin yang sudah terbit	Kabupaten Bantul	400 izin 400 izin	4.000.000	APBD Kabupaten/Kota		400 izin 400 izin	60.000.000
0407.021201.31.025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Keluaran : Jumlah lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan Hasil : Terlaksananya lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan	Kabupaten Bantul	1 kali 1 kali	61.068.708	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	65.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2019. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

